

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Latief, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- A. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung
- AbdulKadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Sanusi, 2009. *Kepimpinan Sekarang Dan Masa Depan Dalam Membentuk Budaya Organsiasi Yang Efektif*. Prospect, Bandung
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Akdon dan Ridwan. 2003. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Alfabeta, Bandung
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 2014, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legilasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum*

- Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Thafa Media, Yogyakarta
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoretis*, FH UII Press, Yogyakarta
- Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chairul Huda, 2015, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Padang
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada. Jakarta

- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, McGraw-Hill
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Maria Farida Indrati S. 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius. Yogyakarta
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Nur Basuki Minarno. 2008. *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laskbang Mediatama
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M Hadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Prakoso, J, 2020, *Manajemen Anggaran dalam Pemerintahan*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption*, University of California Press

- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta
- Soedijarto, M. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, *Pergeseran paradigam dalam kajian kajian sosial dan hukum*, Setara press, Malang
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok
- Wahyudi, D, 2021, *Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Publik*. Pustaka Alam Surabaya
- Wibawa, Samudra, et.al, 2007, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo. Jakarta

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri PANRB No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara

Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Persetujuan RKAB Pertambangan.

### **Jurnal**

Alexandro R. Bujung, Roosje M.S. Sarapun, dan Nelly Pinangkaan, 2023, *Penerapan Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014*, Jurnal Administratum, Volume. 3, Nomor 1

- Annisa Putrijanti, 2019, *Kompetensi PERATUN untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Segi Access to Justice*, IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1
- Arifin, F., & Akbar, MI. 2024. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional". *Jurnal Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 4. Nomor 1
- AP Rizkyta dan BR Ningsih, 2022, *Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan PTUN dan Pengadilan Tipikor*, *Jurnal Esensi Hukum* Volume 4 Nomor 2
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih, dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan: Bandung
- BT Santoso dkk, 2023, *Optimalisasi Peran PTUN dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan berdasarkan UU 30/2014 jo PERMA 4/2015*. *Jurnal Gagasan Hukum*. Volume 5 Nomor 1
- Colin Scott, 2004, *Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-Regulatory State*, 27 *Journal of Law and Society*
- E. D. Safitri, and N. Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor. 1
- FN Anggoro, 2016, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN*, *Fiat Justisia*, Volume 10. Nomor 4.
- F N Anggoro, 2022, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil*, *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 11 Nomor 2
- G Asmara, 2022, *Diskresi sebagai Dasar Peraturan Kebijakan*, *Jurnal Diskresi*. Vol. 1 No. 1
- Gwe Made Swardhana, 2010 "Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," *Jurnal MMH*, Jilid 39 no 4
- Haris, OK. 2015. *Good Governance dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*. *Yuridika*. Volume 30 Nomor 1

- Husnul Khatimah, 2024, *Pengaturan Diskresi yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol. 2, No. 2
- Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN: 77-82
- Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 05, No 02, ISSN: 2337 – 726
- Marojahan Panjaitan, 2017, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume. 24 Nomor. 3
- MG Faure dan K Svatikova, 2012 *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe*, Journal of Environmental Law. 24(2)
- Michael Faure. 2017, *The Development of Environmental Criminal Law in the EU and its Member States*. Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL) 26(2) DOI: 10.1111/reel.12204.
- M Sahlan, 2016, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 23 Nomor. 2
- Nurul Listiyani, M Yasir Said and Afif Khalid, 2023, *Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience* Volume 12 No 5.
- Panjaitan. 2017, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan* Jurnal: IU Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Vol 24, No 3, Juli
- Rini, NS. 2018. *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 No. 2
- Robertus Dicky Armando, Gde Made Swardana, Sagung Putri M.E. Purwani, *Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam*

*Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jurnal: Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Santoso et al. 2014. *Perancangan Metode Kerja untuk Mengurangi Kelelahan Kerja pada Aktivitas Mesin Bor di Workshop Bubut PT. Cahaya Samudra Shipyard*. Profesiensi, Vol. 2, No. 2

Satria, H., 2019, *Analisis Penyimpangan Anggaran dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 5 No. 2

Suhendar & Kartono, 2020, *Kerugian Keuangan Negara: Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 1

Teguh Satya Bhakti et al., 2018, *Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 12, No. 2

Victor Imanuel W Nalle, 2016, *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10 Nomor 1

Willy Riawan Tjandra, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011

Yanuardi; Vijge, Marjanneke J.; Biermann, Frank. 2021, *Improving Governance Quality through Global Standard Setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia*. The Extractive Industries and Society 8(3), DOI: 10.1016/j.exis.2021.100905.

### **Lain-Lain**

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>.

UNESCAP, What is Good Governance?, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/good-governance.pdf>, diakses 19 Mei 2025.

Korupsi Tambang Nikel Modus 'dokter,' Eks Pejabat KESDM Dituntut 5 Tahun Penjara (Mongabay Indonesia, 29 March 2024) <https://www.mongabay.co.id/2024/03/29/korupsi-tambang-nikel-modus-dokter-eks-pejabat-kesdm-dituntut-5-tahun-penjara/> diakses 8 Juli 2025.

Ombudsman Republik Indonesia, Temuan Maladministrasi dalam Penerbitan Persetujuan RKAB Pertambangan Mineral dan Batubara 2021–2024 (2024) <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-penerbitan-rkab-pertambangan-mineral-dan-batubara-2021-2024> diakses 19 Mei 2025.

<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20230719-ditjen-minerba-intregasikan-aplikasi-moms-mvp-epnbp-pada-komoditas-batubara?utm> , diakses pada tanggal 5 Mei 2025.